

TATA KELOLA KEUANGAN DESA DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN (STUDI KASUS DESA BAROS KABUPATEN SERANG)

Kristina Kuryestra Halawa¹, Laeli Nur Khanifah², Ananda Khansa Sayidina³, Rizki Saeful Bahri⁴

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Email:

6670230137@untirta.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tata kelola keuangan desa dan kualitas pembangunan jalan desa di Desa Baros, Kabupaten Serang. Meskipun Dana Desa telah digulirkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kualitas jalan yang dibangun masih menimbulkan berbagai pertanyaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan meliputi Teori Pembangunan Infrastruktur menurut Todaro dan Smith (2015), yang menekankan kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, kualitas fisik bangunan, dan keberlanjutan pemanfaatan. Teori tata kelola keuangan desa juga digunakan untuk mengevaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana praktik tata kelola keuangan memengaruhi hasil pembangunan jalan dari segi kualitas, manfaat, dan efektivitas penggunaan dana. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang administrasi publik dan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan jalan yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tata kelola keuangan desa, APBDes, pembangunan jalan, infrastruktur desa, Dana Desa

Abstract

This study aims to analyze the relationship between village financial governance and the quality of road construction in Baros Village, Serang Regency. Although Village Funds have been allocated to support infrastructure development, the quality of constructed roads remains questionable. This qualitative research applies a case study method with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The study employs the Infrastructure Development Theory by Todaro and Smith (2015), which emphasizes the alignment of development with community needs, physical construction quality, and long-term sustainability. The village financial governance theory is also used to assess the planning, implementation, and accountability stages of the budgeting process. The research focuses on how financial governance practices influence road construction outcomes in terms of quality, usefulness, and the effective use of funds. The findings are expected to contribute theoretically to public administration studies and practically to village governments in improving participatory, accountable, and sustainable road development.

Keywords: Village financial governance, APBDes, road development, rural infrastructure, Village Funds

LATAR BELAKANG

Meskipun pemerintah pusat telah menggulirkan Dana Desa dalam jumlah yang besar sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dalam implementasinya masih banyak ditemukan tantangan. Masalah seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, menjadi hambatan serius yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana tersebut.

Desa Baros menjadi salah satu contoh nyata yang menghadapi kondisi tersebut, sehingga penting untuk diteliti bagaimana realita pengelolaan keuangannya di lapangan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan yang cukup besar dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggarannya secara mandiri. Namun, besarnya kewenangan ini belum tentu diiringi dengan kemampuan teknis dan sistem pengelolaan yang memadai. Banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penting dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di Desa Baros dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pembangunan desa, khususnya pada sektor infrastruktur yang menyerap dana cukup besar.

Meskipun Dana Desa telah banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum lainnya, tidak sedikit pembangunan tersebut yang kualitasnya dipertanyakan atau bahkan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa kualitas infrastruktur tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tata kelola keuangan desa yang mengaturnya. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelusuri apakah terdapat korelasi yang kuat antara tata kelola keuangan desa yang baik dengan hasil pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan fokus pada Desa Baros, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris sekaligus rekomendasi yang relevan untuk perbaikan sistem tata kelola dan pembangunan desa ke depan.

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian mengenai hubungan antara tata kelola keuangan desa dan kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan desa di Desa Baros, Kabupaten Serang, digunakan dua landasan teori utama yang saling melengkapi dalam memberikan kerangka analisis yang komprehensif.

Teori pertama yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Teori Pembangunan Infrastruktur yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam kajian pembangunan ekonomi. Menurut mereka, infrastruktur memiliki peran fundamental sebagai prasyarat dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Infrastruktur, dalam pandangan Todaro dan Smith, tidak hanya dipahami sebagai fasilitas fisik semata, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi, melainkan juga sebagai sarana penting yang mempermudah aktivitas sosial-ekonomi masyarakat serta membuka akses terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tergantung pada tiga aspek penting. Pertama, kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sebuah proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa, akan berdampak positif hanya apabila dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Kedua, teori ini juga menekankan pentingnya kualitas fisik hasil pembangunan. Infrastruktur yang dibangun dengan material yang buruk, tanpa standar teknis yang memadai, atau dikerjakan secara asal-asalan akan menyebabkan penurunan manfaat secara signifikan, bahkan membahayakan keselamatan pengguna. Ketiga, keberlanjutan pemanfaatan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, infrastruktur yang dibangun tidak hanya harus digunakan secara optimal oleh masyarakat, tetapi juga harus dirawat dan dikelola secara berkelanjutan.

Sementara itu, teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tata Kelola Keuangan Desa. Teori ini merupakan turunan dari konsep governance dalam administrasi publik yang kemudian diadaptasi dalam konteks lokal pemerintahan desa di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tata kelola keuangan

desa dipahami sebagai serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Secara teoritis, tata kelola keuangan desa yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip utama good governance, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam tahap perencanaan, pengelolaan keuangan desa harus dimulai dari musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam konteks ini, keterlibatan warga bukan hanya menjadi bentuk demokratisasi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi jaminan bahwa program yang disusun relevan dengan kebutuhan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam tata kelola keuangan desa dan dampaknya terhadap kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna, persepsi, dan realitas sosial masyarakat serta aparatur desa secara menyeluruh dalam konteks kehidupan sehari-hari. Menurut Creswell Studi kasus ini merupakan analisis mendalam tentang “sistem yang terbatas” atau “suatu kasus/berbagai kasus” dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam konteks tertentu. Penelitian memusatkan perhatian pada tiga aspek utama. Pertama, praktik tata kelola keuangan desa yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran desa. Kedua, kualitas pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan, dilihat dari perencanaan, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, kualitas fisik bangunan, dan keberlanjutan pemanfaatannya. Ketiga, penelitian berupaya memahami hubungan antara tata kelola keuangan dan kualitas infrastruktur yang dibangun serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan berkualitas.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan informan kunci seperti perangkat desa seperti sekretaris desa, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat pembangunan jalan. Wawancara bertujuan menggali persepsi, pengalaman, dan praktik nyata pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pembangunan. Observasi dilakukan langsung di lapangan untuk memeriksa kondisi fisik infrastruktur seperti jalan desa, dan fasilitas umum yang didanai Dana Desa. Selain itu, observasi mencakup proses musyawarah desa, pelaksanaan proyek pembangunan, dan interaksi masyarakat dengan hasil pembangunan, sehingga peneliti dapat membandingkan laporan resmi dengan kenyataan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei yang beralokasikan di Desa Baros, Kabupaten Serang, Banten. Desa Baros sebagai lokasi penelitian dipilih karena secara rutin menerima alokasi Dana Desa dan memiliki aktivitas pembangunan infrastruktur yang cukup intens. Kondisi tersebut membuat Desa Baros sangat representatif untuk mengkaji permasalahan tata kelola keuangan desa dan kualitas pembangunan yang terjadi. Meskipun desa Baros dalam infrastruktur jalan memiliki kualitas yang baik, namun beberapa pemukiman belum diberikan infrastruktur yang seimbang dikarenakan banyak faktor penghambat baik dari perangkat desa yang kurang memainkan peran maupun masyarakat minim kepedulian dan pengetahuan.

Gambaran Umum Desa Baros Kabupaten Serang

Desa Baros merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten. Letak geografisnya cukup strategis karena berada di jalur yang menghubungkan wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Secara umum, Desa Baros terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 112 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi wilayah ini sebagian besar datar, namun ada juga bagian yang memiliki kemiringan yang biasanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Secara sosial budaya masyarakat Desa Baros memiliki karakter yang ramah, agamis, dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi lokal masih dijaga dengan baik termasuk kegiatan keagamaan dan adat yang rutin dilaksanakan.

Dari sisi infrastruktur Desa Baros sudah memiliki jalan penghubung antar-desa yang cukup baik walaupun masih terdapat beberapa titik jalan yang perlu perbaikan. Sarana pendidikan dan kesehatan seperti sekolah dasar, madrasah, posyandu, dan puskesmas pembantu juga sudah tersedia, meskipun untuk layanan lanjutan masyarakat masih harus menuju pusat kecamatan atau kota kabupaten. Desa ini juga memiliki potensi wisata lokal yang terus dikembangkan, seperti keindahan alam perbukitan dan air terjun di wilayah sekitarnya. Salah satu desa tetangga, yakni Desa Kubang Baros, bahkan berhasil masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia yang secara tidak langsung ikut mengangkat nama Desa Baros sebagai wilayah yang memiliki potensi pariwisata. Ekonomi masyarakat Desa Baros masih didominasi oleh usaha mikro, seperti warung kelontong, pengrajin rumahan, dan petani skala kecil.

Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Baros Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi anggaran dengan mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Tahun Anggaran 2024 secara terbuka kepada masyarakat. Total pendapatan desa tercatat sebesar Rp1.896.071.000, yang bersumber dari beberapa komponen utama, yaitu Dana Desa (DD) sebesar Rp1.008.041.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp695.600.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp145.400.000, serta Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota sebesar Rp47.030.000. Jumlah tersebut terealisasi hampir sempurna, yaitu sebesar Rp1.895.641.000, atau hanya selisih Rp430.000 dari anggaran yang ditetapkan, yang menunjukkan pengelolaan pendapatan yang baik dan efektif (Dokumentasi visual APBDes Desa Baros, 2025). Dari sisi belanja, total anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp1.874.126.385, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.532.473.000. Ini berarti terdapat sisa anggaran sebesar Rp341.653.385 yang tidak terealisasi. Belanja tersebut dialokasikan ke lima bidang utama. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menghabiskan anggaran sebesar Rp476.089.000 dari total Rp490.000.000 yang direncanakan. Ini mencakup penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, tunjangan BPD, operasional kantor desa, dan pengadaan ATK. Realisasi yang hampir penuh ini mengindikasikan bahwa fungsi pemerintahan desa berjalan

Gambar 1. APBDes Baros 2024

Kategori	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
PENDAPATAN	1.896.071.000	1.895.641.000	430.000
BELANJA	1.874.126.385	1.532.473.000	341.653.385
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	490.000.000	476.089.000	13.911.000
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	400.000.000	385.000.000	15.000.000
BIDANG PENGANGKUTAN BENCANA	100.000.000	95.000.000	5.000.000
JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT	1.874.126.385	1.532.473.000	341.653.385
REMBIAYAAN	0	0	0
SILPA TAHUN BERJALAN	0	0	0

Sumber: APBDes Baros Tahun Anggaran 2024, dokumentasi langsung dari baliho resmi pemerintahan desa Baros (2025)

sebesar Rp341.653.385 yang tidak terealisasi. Belanja tersebut dialokasikan ke lima bidang utama. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menghabiskan anggaran sebesar Rp476.089.000 dari total Rp490.000.000 yang direncanakan. Ini mencakup penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, tunjangan BPD, operasional kantor desa, dan pengadaan ATK. Realisasi yang hampir penuh ini mengindikasikan bahwa fungsi pemerintahan desa berjalan

sesuai rencana. Bidang pelaksanaan pembangunan desa mendapat alokasi tertinggi, yaitu sebesar Rp1.118.190.000, dan terealisasi sebesar Rp870.896.000. Kegiatan dalam bidang ini meliputi pembangunan jalan desa, rabat beton, drainase, hingga pengadaan ambulans.

Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa pembangunan fisik tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Sementara itu, bidang pembinaan kemasyarakatan yang mendapatkan anggaran sebesar Rp7.315.000 telah terealisasi 100%, yang mencerminkan efisiensi dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, meskipun nilai anggarannya kecil. Secara umum, tata kelola keuangan Desa Baros tahun 2024 cukup baik. Pemasangan baliho APBDes di tempat umum merupakan bentuk keterbukaan informasi yang patut diapresiasi. Hal ini tidak hanya memperlihatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Baros Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Dari sisi pendapatan, total dana yang diperoleh oleh Desa Baros mencapai Rp2.292.741.500. Pendapatan ini bersumber sepenuhnya dari pendapatan transfer, karena pendapatan asli desa tidak tercatat pada tahun anggaran ini. Rincian pendapatan transfer meliputi Dana Desa (DD) sebesar Rp1.257.043.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp625.518.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPRD) sebesar Rp90.680.000, Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp320.500.000, serta Pendapatan Lain-lain Dana Transfer Desa sebesar Rp- (tidak tercantum nominal). Dari sisi belanja, Pemerintah Desa Baros mengalokasikan total belanja sebesar Rp2.026.146.847, yang terbagi dalam beberapa bidang prioritas. Sumber dana berasal dari kombinasi ADD, DDS (Dana Desa), BHP, dan sumber lainnya. Selanjutnya, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dianggarkan sebesar Rp132.442.000. Dana ini disiapkan untuk antisipasi penanggulangan bencana alam maupun keadaan mendesak lainnya. Dari total pendapatan dan belanja yang telah dirinci, diketahui bahwa desa memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.505.547, serta pendapatan pembiayaan baru sebesar Rp272.100.000, yang menjadikan total pembiayaan desa sebesar Rp266.594.653.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Desa Baros telah mengelola pendapatan dan belanja secara proporsional, dengan belanja yang dirancang tidak melebihi pendapatan total yang tersedia. Penganggaran ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal, serta memastikan bahwa semua belanja diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kondisi dan Kualitas Infrastruktur Jalan Desa Baros

Desa Baros merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebagai wilayah dengan karakteristik perdesaan yang masih kental, Desa Baros memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar. Namun, seperti

Gambar 2. APBDes Baros 2025

PENDAPATAN		ANGGARAN	SUMBER DANA
Pendapatan Asli Desa		0	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		90.680.000	BHP
Pendapatan Lain-lain Dana Transfer		2.202.061.500	DDS, DDS, BHP
Jumlah Total		2.292.741.500	
RINCIAN BELANJA		ANGGARAN	SUMBER DANA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.118.190.000	DDS, BHP
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.118.190.000	DDS, BHP
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		7.315.000	DDS, BHP
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak		132.442.000	DDS, DDS
Jumlah Belanja		2.026.146.847	
PEMBAYARAN		ANGGARAN	SUMBER DANA
Pembayaran Pembiayaan / Sisa Tahun Sebelumnya		5.505.547	DDS, DDS
Pembayaran Pembiayaan		272.100.000	DDS, DDS
Jumlah Total		283.605.547	

Sumber: APBDes Baros 2025, dokumentasi langsung dari baliho resmi pemerintahan desa Baros (2025)

banyak desa lainnya di Indonesia, tantangan terbesar dalam mempercepat pembangunan adalah kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya optimal. Secara umum, infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas air bersih, sanitasi, listrik, dan sarana pendidikan di Desa Baros sudah tersedia, tetapi belum seluruhnya dalam kondisi baik. Salah satu infrastruktur vital adalah jalan desa. Di beberapa titik, jalan desa telah mengalami perbaikan dan pengerasan, namun sebagian masih berupa jalan tanah atau rusak akibat kurangnya perawatan, khususnya saat musim hujan.

Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi Dana Desa telah menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan infrastruktur di desa, termasuk di Desa Baros. Program-program padat karya, pembangunan jalan lingkungan, saluran irigasi, dan sarana olahraga telah mulai digalakkan. Berikut anggaran dan realisasi APBDes Baros Tahun 2024:

Tabel 1. Anggaran Pembangunan Desa Baros Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Penyelenggaraan Posyandu / PMT Balita	119.700.000	46.200.000	73.500.000
2	Penyuluhan Kesehatan Stunting	15.720.000	15.560.000	160.000
3	Pemeliharaan Pos Kesehatan Desa / Ambulance	18.701.000	18.622.000	79.000
4	Peningkatan Sarana Prasarana Posyandu	11.900.000	10.500.000	1.400.000
5	Pemeliharaan Jalan Lingkungan / Pemukiman	10.190.000	10.190.000	0
6	Pembangunan Rabat Beton Kp. Dukuh Ratu	145.941.000	145.941.000	0
7	Pembangunan Paving Blok Kp. Dukuh Ratu	59.206.800	59.205.500	1.300
8	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kp. Papisir	131.887.000	131.887.000	0
9	Pemeliharaan Jamban / MCK 10 Titik	25.000.000	25.000.000	0
10	Pengeboran Sumber Air Bersih Milik Desa (4 lokasi)	267.221.300	267.206.500	14.800
11	Pengelolaan Fasilitas Sampah	88.514.700	87.495.000	1.019.700
12	Informasi Publik Desa	840.000	840.000	0

Sumber: APBDes Baros dan diolah peneliti (2025)

Terlihat pada APBDes Baros pada tahun 2024 pada pengalokasian pembangunan desa telah tercapai sesuai dengan dana yang telah dianggarkan. Seperti yang terlihat pada poin ‘Pemeliharaan Jalan/Pemukian’ dengan dana Rp10.190.000 telah terealisasi dengan sempurna tidak menyisakan dana sepeserpun. Selain itu, pada tahun 2025 telah dianggarkan juga dalam pembangunan desa terutama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan di Desa Baros. Berikut data APBDes Baros tahun anggaran 2025:

Gambar 3. Anggaran Bidang Pembangunan Desa Baros Tahun 2025

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	ANGGARAN	SUMBER DANA
11. Pemutakhiran Perencanaan Desa		
12. Musyawarah Perencanaan Desa		
Jumlah Total	350.770.000,-	
1. Penyelenggaraan Posyandu / PMT Balita	133.240.000,-	DDS, BHP
2. Penyuluhan Kesehatan	14.647.200,-	DDS
3. Penyelenggaraan Desa Siaga	19.749.000,-	DDS
4. Pemeliharaan Jalan Lingkungan / Pemukiman	10.190.000,-	DDS
5. Pembangunan Rabat Beton Kp.Combong - Kp.Dukuhratu	315.770.000,-	DDS
6. Pembangunan Rabat Beton Kp.Pasir Minda	179.835.400,-	DDS
7. Pembangunan Jalan Usaha Tani / Irigasi Kp.Papasir	82.396.200,-	DDS
8. Informasi Publik Desa	852.000,-	DDS
Jumlah Total	756.679.800,-	

Sumber: Dokumentasi dari baliho APBDes Baros (2025)

Terlihat dari data diatas, anggaran untuk dialokasikan pada pemeliharaan jalan lingkungan/pemukian tahun 2025 sama dengan anggaran tahun 2024, yaitu sebesar Rp10.190.000. Infrastruktur jalan merupakan unsur vital dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di wilayah pedesaan.

Tabel 2. Kondisi Jalan Desa Baros

	<p>Gambar berikut menunjukkan bahwa infrastruktur jalan desa Baros sudah mencapai berbagai pemukiman. Jalan yang masih terlihat baru membuktikan bahwa pemerintahan desa Baros memberikan diri kepada masyarakat dan mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan secara tepat.</p> <p><i>“Dahulu jalan masuk kedalam pemukiman warga masih dalam tahap pembangunan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa digunakan oleh masyarakat”</i> (Wawancara dengan Reni Purbasari sebagai Sekretaris Desa)</p>
	<p>Gambar berikut menunjukkan pedalaman desa Baros yang akses jalannya masih bisa digunakan dengan baik dan masih layak. Terlihat pemeliharaan jalan dari pemerintahan desa Baros telah dilaksanakan semaksimal mungkin agar masyarakat dapat mengakses jalan dengan sejahtera.</p> <p><i>“Pemeliharaan jalan penting untuk diperhatikan, apalagi warga setempat sering menggunakannya.”</i> (Wawancara dengan Reni Purbasari sebagai Sekretaris Desa)</p>

Sumber: Peneliti (2025)

Meski demikian, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Baros belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat beberapa ruas jalan lingkungan yang belum tersentuh pembangunan permanen dan sebagian lagi masih dalam tahap pengerjaan. Beberapa jalan kecil di wilayah permukiman padat atau daerah perbukitan masih berupa jalan tanah atau bebatuan, yang berpotensi rusak saat musim hujan dan menyulitkan warga yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Alokasi Dana Desa setiap tahun diarahkan untuk menyasar titik-titik jalan yang belum layak atau masih rusak. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan kondisi geografis tertentu menjadi kendala teknis yang perlu diatasi secara bertahap dan terencana.

Tabel 4. Kondisi Jalan Desa Baros

	<p>Gambar menunjukkan beberapa jalan pemukiman desa Baros masih belum maksimal dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Hal ini mestinya menjadi evaluasi dari pemerintahan desa agar lebih aktif turun lapangan melihat kerusakan dan jalan yang perlu dilakukan perbaikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.</p>
	<p>Gambar tersebut terlihat salah satu pemukiman di desa baros belum adanya akses jalan atau aspal menuju pemukiman warga. Beberapa warga berpendapat bahwa hal ini dikarenakan pemerintahan desa tidak sering turun dan melihat pemukiman warga yang masih jauh dari jalan raya.</p>

Sumber: Peneliti (2025)

Secara umum, kualitas jalan di Desa Baros menunjukkan tren yang positif, dan masyarakat merasakan langsung manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk mencapai pemerataan pembangunan infrastruktur, dibutuhkan kesinambungan program, pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas pekerjaan, serta partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Baros, mayoritas masyarakat memberikan respons positif terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah mereka.

Gambar 3. Wawancara warga



Sumber: Peneliti (2025)

Warga menyatakan bahwa sebagian besar jalan desa saat ini sudah dalam kondisi baik, terutama jalan-jalan utama dan penghubung antar kampung yang telah dibangun dengan rabat beton maupun paving blok.

Salah satu warga, Nining (25), menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini sangat membantu aktivitas harian masyarakat, khususnya dalam hal mobilitas anak sekolah, petani yang mengangkut hasil panen, serta pelaku usaha kecil.

“Dulu kalau hujan, jalannya becek dan licin, sekarang sudah enak dilalui motor bahkan mobil juga bisa lewat,” ujar warga tersebut.



Warga juga mengapresiasi peran pemerintah desa dalam memperhatikan kebutuhan infrastruktur yang mendasar seperti jalan. Namun demikian, beberapa warga masih berharap agar pembangunan jalan di beberapa titik yang belum tersentuh segera diselesaikan, khususnya jalan usaha tani dan jalan lingkungan di wilayah pinggiran desa. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek pembangunan yang paling dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi simbol keberhasilan pembangunan fisik di desa.

Peran Perangkat dan Lembaga Desa dalam Menangani Keluhan Masyarakat

Perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris, dan kaur keuangan memegang peran utama dalam tata kelola anggaran dan penyelesaian keluhan warga. Kepala desa sebagai pemimpin pengambil keputusan, sekretaris mengelola administrasi, sementara kaur keuangan menangani pencatatan dan realisasi anggaran. Selain itu, lembaga desa seperti BPD berfungsi menyampaikan aspirasi warga dan mengawasi anggaran, LPM menjembatani aspirasi pembangunan, serta organisasi seperti karang taruna dan PKK menyuarakan kepentingan kelompok pemuda dan perempuan. Hambatan tata kelola keuangan desa Baros menurut hasil wawancara menyebutkan, antara lain: (1) Keterbatasan SDM. Perangkat desa belum optimal dalam menggunakan sistem digital seperti Siskeudes, yang berdampak pada keterlambatan dan kesalahan laporan. (2) Kurangnya Pengawasan Eksternal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa di Desa Baros masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas infrastruktur jalan yang dibangun, di mana masih ditemukan jalan yang rusak ringan, kurang merata pembangunannya, serta kualitas fisiknya belum optimal. Temuan ini memperkuat teori tata kelola keuangan desa yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, tanggung jawab, efektivitas, dan pelibatan warga agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata. Di sisi lain, pembangunan jalan di Desa Baros telah memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan mobilitas warga, namun belum sepenuhnya memenuhi fungsi sosial dan jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam teori pembangunan infrastruktur oleh Michael dan Stephen. Menurut teori tersebut, infrastruktur bukan hanya proyek fisik, tetapi instrumen penting dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, untuk mewujudkan infrastruktur desa yang berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola keuangan desa yang lebih baik, sinergis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Adiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 188-197
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222-229.
- Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Wijayanto, W., & Manar, D. G. (2020). Memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mengefektifkan dana desa. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(4), 268-274.
- Alinsari, N., Nugrahesthy, A., & Prasetya, A. (2022). Sudahkah Asas Pengelolaan Keuangan Desa Terimplementasi?. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 7(1), 10-19.
- Ambodo, T. (2023). Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance. *Islamic*



- Law: Jurnal Siyasah, 8(02), 35-51.
- Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(4).
- Atifah, N., Hamidi, W., & Desweni, S. P. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. *Journal of Social and Policy Issues*, 6-10.
- Basri, S., & Irawan, A. D. (2023, August). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. In *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila (Vol. 2, pp. 205-214)*.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Jawa Tengah: Pustaka Pelajar.
- Eko, S. (Ed.). (2018). *Tata kelola pembangunan desa*. Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Gazalin, J., Asiri, L., Mansur, M., Mayunita, S., Kastan, K., Wiranto, R., ... & Hanafi, H. (2022). Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa. *Journal of Community Development*, 3(1), 24-32.
- Hasan, S., Kasim, N. M., & Tijow, L. M. (2021). Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Prospektif Pengawasan Berbasis Masyarakat. *Maleo Law Journal*, 5(1), 1-17.
- Hidayat, A., & Prasetyo, T. A. (2023). Pengaruh Fasilitas Infrastruktur Jalan Raya Di Desa Sumber Rejeki Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 4(1).
- Imawan, A., & Mas'adah, N. (2021). Transformasi Tata Kelola Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 689-710.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086-1095.
- Ismatullah, I., & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 1-11.
- Lambuaso, D. H., Pangemanan, S., & Monintja, D. (2020). Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(5)
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57-66.
- MARYONO, M., BAGANA, B. D., & SANTOSA, A. B. (2023). Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Dana Desa Menuju Masyarakat Desa Sejahtera. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 96-101.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit NEM.
- Mlik, O., Renouw, A. A., & Banea, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), 998-1007.
- Mustofa, A., & Afifah, F. A. N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46-62.
- Mudhofar, M., Studi Akuntansi, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, S. (2022). Analisis implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset*



- Akuntansi Dan Keuangan, 10(1).
- Prantika, S. A., & Oktari, V. (2025). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(3), 215-219.
- Putra, G. S. A., Sanjaya, I. G. N., & Yudha, C. K. (2024). Analisis Peran Sistem Keuangan Desa Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Akurasi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 550-563.
- Perdana, W., Purwati, A. S., & Sarmilasari, M. (2022, July). Analisis Efektivitas dan Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Tahun Anggaran 2020-2021). In *Proceeding of Midyear International Conference (Vol. 1)*.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa*. Bumi Aksara.
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(2), 187-196.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Sondakh, H., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(1).
- Wahidin, D. T. S., Juned, M., Maryam, S., Zempi, C. N., & Ummah, A. (2024). Pembangunan Desa Digital Berkelanjutan Di Desa Baros. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(2), 218-231.
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 167-179.
- Yunus, R. (2025). MANAJEMEN KEUANGAN DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT: STRATEGI TATA KELOLA KEUANGAN YANG BERKELANJUTAN. *Journal Publicuho*, 8(1), 581-590.